



Article Informations
Corresponding Email:
anastamanuelle@gmail.com

Received: 26/08/2024; Accepted:
08/02/2025; Published: 17/02/2025

DAMPAK PENYELESAIAN ISU COMFORT WOMEN TERHADAP DIPLOMASI JEPANG DAN KOREA SELATAN

Anastasya Emmanuelle Chariska

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstract

This essay explores the intricate and ongoing diplomatic tension between South Korea and Japan, rooted in the historical issue of "Comfort Women" (Jugun Ianfu) during World War II. Following Japan's defeat in the war, the country adopted a pacifist stance and sought to rebuild relations with its former colonies, including Korea. The atrocities committed against Korean women, forcibly conscripted as sexual slaves for Japanese soldiers, have left deep scars and remain a contentious issue. Despite several attempts to address the matter, including the 2015 agreement between the two nations, significant challenges persist. The agreement, which included a formal apology, financial compensation, and a promise to resolve the issue irreversibly, has faced criticism from victims and activists who feel it inadequately addressed their suffering and excluded them from the negotiation process. The essay also highlights the broader repercussions of this historical issue, including economic impacts such as trade disputes and supply chain disruptions, as well as heightened anti-Japanese sentiment in South Korea. Additionally, it examines the strain on trilateral security cooperation involving the U.S., South Korea, and Japan. The analysis underscores the complexity of achieving a fair resolution and the need for continued dialogue and inclusive approaches to heal historical wounds and improve bilateral relations.

Keywords: *Comfort Women, Jugun Ianfu, South Korea, Japan, Diplomacy, 2015 Agreement, Diplomatic Tension, Trade War, Anti-Japanese Sentiment, Security Cooperation.*

Abstrak

Esai ini mengeksplorasi ketegangan diplomatik yang rumit dan berkelanjutan antara Korea Selatan dan Jepang, yang berakar pada isu sejarah "Wanita Penghibur" (Jugun Ianfu) selama Perang Dunia II. Menyusul kekalahan Jepang dalam perang tersebut, negara tersebut mengambil sikap pasifis dan berupaya membangun kembali hubungan dengan bekas jajahannya, termasuk Korea. Kekejaman yang dilakukan terhadap perempuan Korea, yang diwajibkan wajib militer sebagai budak seksual bagi tentara Jepang, telah meninggalkan luka yang dalam dan masih menjadi isu yang diperdebatkan. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk perjanjian antara kedua negara pada tahun 2015, tantangan besar masih tetap ada. Perjanjian tersebut, yang mencakup permintaan maaf resmi, kompensasi finansial, dan janji untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen, telah mendapat kritik dari para korban dan aktivis yang merasa perjanjian tersebut tidak cukup mengatasi penderitaan mereka dan mengecualikan mereka dari proses negosiasi. Esai ini juga menyoroti dampak yang lebih luas dari masalah sejarah ini, termasuk dampak ekonomi seperti perselisihan perdagangan dan gangguan rantai pasokan, serta meningkatnya sentimen anti-Jepang di Korea Selatan. Selain itu, laporan ini mengkaji ketegangan pada kerja sama keamanan trilateral yang melibatkan AS, Korea Selatan, dan Jepang. Analisis ini menggarisbawahi kompleksitas dalam mencapai resolusi yang adil dan perlunya dialog berkelanjutan dan pendekatan inklusif untuk menyembuhkan luka sejarah dan meningkatkan hubungan bilateral.

Kata Kunci: Comfort Women, Jugun Ianfu, Korea Selatan, Jepang, Diplomasi, Perjanjian 2015, Ketegangan Diplomatik, Perang Dagang, Sentimen Anti-Jepang, Kerjasama Keamanan.

Pendahuluan

Jepang merupakan negara yang melakukan politik demarkasi pada tahun 1940an hingga pecah perang dunia II yang berakhir tahun 1945. Adanya perang dunia II dan kekalahan Jepang pada perang tersebut membuat adanya perubahan kebijakan. Setelah kekalahan, membuat Jepang menjadi negara pasifis dan berupaya membangun hubungan baik kembali pada negara – negara sekitar yang juga bekas jajahan. Salah satunya adalah Korea selatan yang pernah menjadi bekas penjajahan Jepang. Penjajahan Korea selatan masih membekas bagi masyarakat.

Tindakan penindasan dan penundukan yang dilakukan oleh Jepang menghadirkan dampak kemanusiaan yang tak terperi. Salah satu wujudnya adalah pembentukan Comfort Station, sebuah entitas yang berfungsi sebagai tempat "hiburan" bagi tentara Jepang di Korea Selatan. Comfort Station ini diisi oleh para remaja perempuan yang usianya berkisar antara belasan hingga dua puluhan tahun. Mereka, dengan paksaan, diperkerjakan oleh

tentara Jepang sebagai penghibur yang dikenal dengan sebutan Comfort Women .

Hal tersebut akhirnya membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap isu mengenai Comfort Women yang kembali menjadi bahan perbincangan dan perdebatan oleh para Petinggi Negara hingga Calon pemimpin yang akan mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin di Korea Selatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Kumagai, 2016. Penulis memperkirakan bahwa kemunculan studi mengenai comfort women mulai banyak diteliti pada tahun-tahun pasca berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Pembahasan

Isu Jugun Ianfu, atau Comfort Women, merujuk pada wanita-wanita yang dipaksa menjadi pekerja seks oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Masalah ini menjadi salah satu sumber ketegangan yang paling signifikan antara Korea Selatan dan Jepang sejak berakhirnya perang. Setelah Perang Dunia II, Korea Selatan terus berusaha untuk mengungkapkan kekejaman yang dialami oleh para wanita tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari Jepang. Pada sisi lain, Jepang selama bertahun-tahun menolak mengakui adanya perekrutan paksa dan bahkan menyangkal keberadaan Jugun Ianfu. Sejak awal, isu ini telah menjadi duri dalam daging hubungan bilateral kedua negara . Pemerintah Korea Selatan, didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia, menuntut permintaan maaf yang tulus dan kompensasi yang layak dari pemerintah Jepang. Sementara itu, Jepang cenderung menghindari tanggung jawab penuh dengan berbagai alasan politik dan hukum, sering kali hanya memberikan pernyataan maaf yang ambigu dan tidak diiringi tindakan konkrit.

Pada 28 Desember 2015, setelah serangkaian negosiasi yang panjang dan penuh ketegangan, Korea Selatan dan Jepang mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan isu ini secara tuntas dan tidak dapat diubah lagi. Kesepakatan tersebut mencakup beberapa poin utama. Pertama,

permintaan maaf resmi dari Pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe, yang menyampaikan permintaan maaf kepada para korban Jugun Ianfu dan mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh para wanita tersebut serta mengakui keterlibatan militer Jepang dalam praktik ini. Kedua, kompensasi finansial sebesar 1 miliar yen untuk mendirikan yayasan bagi para korban yang masih hidup, yang dimaksudkan untuk mendukung rehabilitasi fisik dan psikologis serta memulihkan martabat para korban. Ketiga, jaminan bahwa kesepakatan ini adalah final dan tidak dapat diubah lagi, yang berarti kedua belah pihak harus menghormati dan menjalankan isi perjanjian tanpa ada upaya untuk membatalkan atau mengubahnya di kemudian hari. Terakhir, Korea Selatan berjanji untuk mempertimbangkan penghapusan patung-patung Jugun Ianfu yang didirikan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul dan lokasi-lokasi lainnya, yang telah menjadi simbol protes dan penghinaan bagi Jepang.

Namun, meskipun dianggap sebagai langkah besar dalam upaya memperbaiki hubungan diplomatik antara kedua negara, perjanjian ini menimbulkan reaksi yang beragam, terutama di Korea Selatan. Banyak korban dan kelompok aktivis merasa bahwa perjanjian tersebut tidak mengakui sepenuhnya penderitaan mereka dan tidak melibatkan para korban dalam proses negosiasi. Mereka merasa tidak diikutsertakan dalam proses negosiasi dan keputusan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan dan Jepang. Keputusan ini dianggap tidak menghormati mereka sebagai pihak yang paling terkena dampak. Meskipun ada kompensasi finansial sebesar 1 miliar yen, banyak korban merasa bahwa jumlah tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Selain itu, kompensasi ini juga dipandang tidak cukup untuk menutupi trauma fisik dan psikologis yang mereka alami.

Pada tanggal 2 November 2015, sekitar pukul 10.00 WIB, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye di Seoul, dalam rangka menghadiri pertemuan trilateral antara Korea Selatan, China, dan Jepang. Ini adalah pertemuan bilateral formal pertama antara kedua pemimpin sejak mereka

menjabat pada 2012 dan 2013 (Thepeninsulaqatar, 2015). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk segera menyelesaikan masalah jugun ianfu atau perempuan yang dipaksa bekerja di rumah bordil militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II. Perdana Menteri Abe mengumumkan kesepakatan tersebut setelah perundingan formal pertama mereka, berupaya mengatasi isu-isu sejarah masa perang yang telah mengganggu hubungan kedua negara. Pertemuan ini juga menjadi keberhasilan diplomatik bagi Abe di tengah tekanan AS untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan guna menghadapi China dan Korea Utara. Tokyo dan Seoul berupaya menemukan kesamaan pandangan mengenai kolonialisasi Jepang, khususnya isu ianfu. Presiden Park menegaskan pentingnya penyelesaian perselisihan terkait jugun ianfu untuk hubungan yang lebih baik dengan Jepang, menekankan perlunya solusi yang diterima oleh para korban dan masyarakat Korea Selatan

Secara rinci, pertemuan tingkat tinggi dimulai dengan pertemuan kelompok kecil selama satu jam, diikuti pertemuan yang lebih luas selama 45 menit. Pada pertemuan kelompok kecil ini, selain kedua pemimpin negara, hadir juga Yun Byung-se (Menteri Luar Negeri Korea Selatan), Kim Kyou-hyun (Sekretaris Senior Presiden untuk Urusan Luar Negeri), serta petugas keamanan Korea Selatan. Dari Jepang hadir Fumio Kishida (Menteri Luar Negeri), Koichi Hagiuda (Wakil Sekretaris Kabinet), dan Shotaro Yachi (Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional). Kedua pemimpin berdiskusi terbuka mengenai berbagai isu antara Korea Selatan dan Jepang. Abe menjelaskan posisi Jepang dan meminta Korea Selatan untuk melanjutkan pembahasan lebih jauh. Mereka sepakat bahwa isu jugun ianfu berdampak pada hubungan kedua negara dan penting untuk membangun hubungan yang berorientasi masa depan, agar generasi mendatang tidak terganggu oleh masalah ini. Kedua pemimpin menginstruksikan percepatan konsultasi untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, mengingat tahun ini adalah peringatan 50 tahun normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang.

Pada pertemuan sesi kedua, kedua pemimpin menghargai bahwa hubungan bilateral semakin mendalam, membahas kerja sama di bidang

keamanan, pertukaran warga negara, dan kerja sama ekonomi. Abe mengemukakan situasi di Laut China Selatan. Diskusi juga mencakup masalah Korea Utara, dengan konfirmasi bahwa Korea Selatan dan Jepang, serta Korea Selatan, AS, dan Jepang akan bekerja sama lebih kuat dalam bidang keamanan terhadap Korea Utara terkait denuklirisasi. Mereka berbagi pandangan untuk bekerja sama dalam masalah kemanusiaan, termasuk masalah penculikan. Mereka juga membahas berbagai isu ekonomi, seperti memperdalam hubungan ekonomi bilateral dan pentingnya perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan, China, dan Jepang, serta Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015).

Sehari sebelum pertemuan ini, telah ada pertemuan antara Yun Byung-se dari Korea Selatan dan Fumio Kishida dari Jepang. Setelah pertemuan ini, Abe menginstruksikan Menteri Luar Negeri Jepang untuk melanjutkan pembahasan jugun ianfu selama kunjungannya ke Seoul pada Desember 2015. Isu ini telah menjadi penghambat hubungan kedua negara selama beberapa dekade, dengan Korea Selatan menganggap permintaan maaf Jepang belum cukup. Namun, hubungan membaik ketika kedua negara sepakat mempercepat diskusi mengenai jugun ianfu (BBCNews, 2015). Selain diskusi tingkat pemimpin negara, ada juga pembicaraan tertutup pada level direktur jenderal antara Korea Selatan dan Jepang yang mencapai 12 kali pertemuan sejak April 2014. Pada pertemuan tingkat tinggi pertama pada Februari 2015, Korea Selatan mengajukan tuntutan agar Jepang mengakui tanggung jawabnya, meminta maaf secara resmi, dan memberikan jaminan bahwa permintaan maaf tidak akan ditarik kembali. Kedua negara akhirnya mencapai perjanjian sementara pada Konsultasi Tingkat Tinggi keempat pada April 2015, dengan resolusi akhir yang tidak dapat diubah, menyepakati penghapusan patung jugun ianfu, dan menahan diri dari kritik di forum internasional.

Pada Juni 2015, ketegangan meningkat terkait isu fasilitas industri Jepang yang masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO, yang berdampak pada konsultasi jugun ianfu. Namun, pertemuan trilateral pada 1 November 2015 memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk melanjutkan

konsultasi, dan pada 2 November mereka sepakat untuk menyelesaikan isu Jugun Ianfu sesegera mungkin.

Korban dan aktivis menginginkan pengakuan penuh dan permintaan maaf tanpa syarat dari Jepang. Mereka merasa bahwa permintaan maaf yang diberikan dalam perjanjian tersebut masih setengah hati dan tidak mengakui sepenuhnya tanggung jawab Jepang. Bagi banyak korban, stigma sosial yang melekat sebagai Jugun Ianfu merupakan masalah besar. Mereka merasa bahwa perjanjian ini tidak cukup untuk menghapuskan stigma tersebut dan mengembalikan kehormatan mereka. Selain itu, perjanjian ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak di Jepang. Beberapa politisi dan kelompok sayap kanan menganggap bahwa permintaan maaf dan kompensasi ini sebagai bentuk kelemahan dan pengakuan yang tidak perlu terhadap tuduhan yang mereka anggap tidak berdasar. Mereka juga khawatir bahwa pengakuan ini akan membuka pintu bagi tuntutan serupa dari negara-negara lain yang pernah dijajah oleh Jepang.

Pada tahun 2018, pemerintah Korea Selatan di bawah Presiden Moon Jae-in menyatakan bahwa perjanjian 2015 tidak memadai dalam menyelesaikan isu Jugun Ianfu dan berencana untuk membatalkannya. Presiden Moon menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi keinginan para korban dan masyarakat Korea Selatan yang menginginkan pengakuan dan kompensasi yang lebih adil dari Jepang. Langkah ini menimbulkan reaksi keras dari Jepang yang merasa bahwa Korea Selatan tidak menghormati kesepakatan internasional yang telah dicapai. Jepang menyatakan bahwa perjanjian tersebut sudah final dan tidak dapat diubah lagi, sehingga keputusan Korea Selatan untuk membatalkan perjanjian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma diplomatik.

Ketegangan semakin meningkat ketika pengadilan Korea Selatan memutuskan untuk menyita aset perusahaan Jepang sebagai kompensasi bagi para korban kerja paksa selama masa penjajahan Jepang. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian 2015 yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi para korban. Jepang merespons dengan tindakan diplomatik yang keras, termasuk membatasi ekspor bahan-

bahan teknologi tinggi ke Korea Selatan, yang mempengaruhi industri teknologi negara tersebut. Tindakan ini memicu krisis ekonomi dan mengakibatkan kerugian besar bagi sektor teknologi di Korea Selatan. Pembatasan ekspor ini juga memaksa Korea Selatan untuk mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain dan mengurangi ketergantungan pada Jepang yang dimulai sejak Tahun 2019.

Pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2019 menargetkan bahan-bahan utama yang diperlukan untuk produksi semikonduktor dan elektronik lainnya, industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Korea Selatan. Gangguan ini menyebabkan kekacauan dalam rantai pasokan global dan memaksa perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk beradaptasi dengan cepat, mencari pemasok alternatif, dan mengembangkan teknologi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku dari Jepang. Langkah-langkah ini, meskipun diperlukan, menambah biaya produksi dan mengurangi profitabilitas, memberikan tekanan tambahan pada ekonomi Korea Selatan yang sudah berjuang dengan pertumbuhan yang melambat.

Selain dampak ekonomi langsung, ketegangan diplomatik ini juga mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas ekonomi di Korea Selatan. Ketidakpastian yang meningkat mengenai hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang membuat beberapa investor ragu untuk menanamkan modal di negara tersebut. Penurunan kepercayaan ini dapat mengurangi aliran investasi asing ke Korea Selatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara tersebut. Ketegangan yang meningkat juga mempengaruhi kerjasama keamanan di kawasan Asia Timur. Korea Selatan dan Jepang, yang seharusnya menjadi sekutu dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan meningkatkan stabilitas regional, justru terlibat dalam perselisihan yang berkepanjangan. Ketidakmampuan kedua negara untuk bekerja sama secara efektif mengurangi efektivitas aliansi mereka dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman bersama. Situasi ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak seperti China dan Korea Utara, yang dapat memanfaatkan

ketegangan ini untuk memperkuat posisi mereka di kawasan dan mengurangi tekanan dari aliansi AS-Korea Selatan-Jepang.

Di tengah ketegangan ini, ada beberapa upaya untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi yang lebih inklusif dan adil. Dialog terbuka antara pemerintah, para korban, dan kelompok aktivis menjadi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, penyelesaian isu Jugun Ianfu memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan menghormati hak-hak para korban. Pengakuan penuh dan permintaan maaf tanpa syarat dari pemerintah Jepang sangat penting untuk memulihkan kehormatan dan martabat para korban. Selain itu, kompensasi yang adil dan berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan yang layak. Sehingga, Adanya isu Comfort Women ini berdampak pada hubungan antara Jepang dengan negara-negara yang pernah diduduki, terutama hubungan Jepang dan Korea Selatan. Isu Comfort Women berdampak pada tiga hal, yakni perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang, terhambatnya supply chain, serta sentimen anti-Jepang dan boikot yang dilakukan masyarakat yang dijabarkan dalam kategori berikut :

1. Perang Dagang antara Jepang dan Korea Selatan Menghambat Supply Chain Industri Semikonduktor

Isu Comfort Women berdampak pada perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan. Keadaan perang dagang dimulai pada tahun 2018, ketika pengadilan tinggi Korea Selatan meminta beberapa perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi, untuk memberikan kompensasi sebesar 150 juta Won kepada para korban perbudakan, termasuk Comfort Women, yang dipaksa bekerja tanpa dibayar di pabrik Mitsubishi di Nagoya pada tahun 1944 . Perusahaan yang menolak memberikan kompensasi asetnya akan disita oleh pengadilan tinggi Korea Selatan . Jepang yang merasa terdesak dengan keadaan ini mengambil keputusan untuk menarik beberapa perusahaan besarnya dari Korea Selatan. Sebanyak 45 perusahaan dalam bidang pakaian, elektronik, dan pabrik mobil, seperti Nissan dan menarik diri dari Korea Selatan sejak Maret hingga November 2020 . Perilaku Korea Selatan

dikhawatirkan merugikan perusahaan-perusahaan besar Jepang, sehingga Jepang memberi balasan dengan mengeluarkan Korea Selatan dari Whitelist mitra dagang sejak 1 Juli 2019 . Whitelist merupakan daftar negara-negara Grup A yang bermitra dagang dengan Jepang, yang bebas dari seluruh prosedur ekspor untuk semua produk-produk Jepang . Dengan dikeluarkannya Korea Selatan dari Grup A menjadi Grup B, ada peraturan pembatasan ekspor terhadap tiga bahan utama untuk pembuatan semikonduktor, yakni Polymides, Photoresist, dan Hydrogen Fluoride. Batasan yang diberikan bagi negara mitra di Grup B adalah prosedur ekspor yang memerlukan persetujuan dari pemerintah Jepang, yang memakan waktu selama 90 hari kerja . Korea Selatan membalas sikap Jepang dengan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra dagang dan melaporkan tindakan Jepang ke WTO. Jepang yang semula merupakan mitra dagang Grup A diturunkan menjadi Grup A-2. Akibat perubahan status ini, Korea Selatan melakukan pembatasan pembelian bahan-bahan industri pembuatan senjata dari Jepang . Pada September 2019, Korea Selatan melaporkan Jepang ke WTO atas tindakan yang dianggap melanggar beberapa pasal dalam aturan GATT 1994 . Menurut aturan tersebut, Korea Selatan merasa dirugikan dengan adanya pembatasan ekspor dari Jepang. Korea Selatan sangat bergantung pada Jepang dalam industri semikonduktor, karena Jepang adalah supplier terbesar dunia dalam penyediaan bahan-bahan dan perlengkapan untuk pembuatan semikonduktor. Jepang mendominasi 90% penyediaan Fluorinated Polymide dan Photoresist, serta 70% penyediaan Hydrogen Fluoride. Sebagai produsen semikonduktor terbesar, Korea Selatan bergantung pada Jepang dalam penyediaan bahan-bahan ini sebanyak 90% untuk Fluorinated Polymide dan Photoresist, serta 44% Hydrogen Fluoride . Ketergantungan ini menyebabkan Korea Selatan kesulitan mencari pengganti supplier bahan-bahan tersebut. Korea Selatan adalah salah satu negara industri semikonduktor terbesar yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam negeri seperti Samsung dan SK Hynix untuk memproduksi chip memori. Produk-produk semikonduktor dan chip ini juga diekspor ke perusahaan di luar Korea Selatan untuk digunakan dalam pengembangan berbagai produk elektronik dan teknologi artificial

intelligence (AI) pada laptop, handphone, dan komputer . Hubungan yang saling membutuhkan dan bergantung ini menyebabkan Jepang bisa kehilangan pasar terbesarnya, sementara Korea Selatan bisa kehilangan supplier terbesarnya. Ketegangan ini menyebabkan penurunan persentase ekspor-impor antara kedua negara. Jepang dan Korea Selatan memainkan peran besar dalam industri semikonduktor, dan perang dagang yang terjadi dengan dikeluarkannya Korea Selatan dari Whitelist serta pembatasan ekspor bahan-bahan semikonduktor ini berisiko mengganggu supply chain antara kedua negara, serta memperlambat proses global value chain dalam industri semikonduktor .

2. Sentimen Anti-Jepang dan Boikot Produk Jepang

Sejarah kolonialisasi dan Comfort Women menimbulkan trauma dan amarah bagi wanita dan masyarakat di negara yang pernah diduduki oleh Jepang, sehingga menciptakan sentimen anti-Jepang. Masyarakat Korea Selatan dan China melakukan boikot terhadap produk Jepang sebagai bentuk sentimen anti-Jepang. Sejak Juli 2019, ribuan warga Korea Selatan memboikot produk-produk Jepang. Untuk memperluas gerakan boikot ini, masyarakat Korea Selatan melakukan kampanye dengan membawa tulisan "No Japan". Beberapa restoran dan taksi melarang turis Jepang untuk masuk dengan memberikan tanda peringatan di luar restoran dan di kursi taksi. Masyarakat juga membuat aplikasi di telepon seluler yang memberikan informasi produk-produk Jepang yang harus diboikot. Produk-produk Jepang yang terdampak dari kampanye boikot ini termasuk pakaian bermerek Uniqlo, beer dan alkohol, Honda, dan Toyota. Pasar swalayan menarik beberapa produk barang konsumsi dari Jepang. Boikot yang semula hanya pada produk barang konsumsi meluas ke ranah budaya dan pariwisata. Tiket penerbangan dan agensi wisata ke Jepang dibatalkan, sehingga menurunkan keuntungan dalam bisnis tersebut. Dalam ranah budaya, masyarakat Korea Selatan memboikot film dan buku cerita khas Jepang seperti film Butt Detective the Movie, Doraemon, Detective Conan, dan Sinchan. Kampanye boikot Jepang terus berkembang dan merambah ke berbagai ranah pekerjaan. Kampanye "No Japan" ini merupakan balasan

masyarakat Korea Selatan kepada Jepang selama perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan pada 2018-2020. Kampanye ini dilakukan sebagai bentuk kemarahan dan perlawanan masyarakat Korea Selatan atas sikap perusahaan Jepang yang menolak memberikan kompensasi.

3. Penarikan Diri dari GSOMNIA

Isu Comfort Women juga membahayakan keamanan aliansi di Asia Timur . Pada Agustus 2019, Korea Selatan mengancam akan keluar dari perjanjian GSOMNIA (General Security of Military Information Agreement), yang merupakan perjanjian trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang untuk saling berbagi informasi intelijen mengenai perkembangan nuklir milik Korea Utara . Ancaman ini bertujuan untuk mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan Jepang agar hubungan perdagangan dapat kembali berjalan baik . Melemahnya aliansi trilateral ini menguntungkan negara-negara yang menentang Amerika Serikat seperti China, Korea Utara, dan Russia. Hal ini terlihat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China . Pada tahun 2019, terjadi ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat akibat uji coba rudal yang gencar dilakukan Korea Utara . Aliansi trilateral dalam GSOMNIA yang melemah mengurangi pengawasan terhadap negara-negara oposisi Amerika Serikat, yang dapat membahayakan kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur. Dari tiga poin tersebut, tergambar bahwa isu Comfort Women memberikan dampak signifikan pada hubungan Korea Selatan-Jepang yang mengalami ketegangan dalam politik dan ketergantungan ekonomi. Keadaan ini menyebabkan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan yang bersifat dingin dalam politik, namun hangat dalam perekonomian .

Penyitaan aset perusahaan Jepang oleh pengadilan Korea Selatan menambah ketegangan antara kedua negara. Pada tahun 2018, pengadilan

tinggi Korea Selatan memutuskan untuk menyita aset perusahaan Jepang sebagai kompensasi bagi para korban kerja paksa selama masa penjajahan Jepang. Keputusan ini diambil setelah korban kerja paksa dan Jugun Ianfu menuntut keadilan atas penderitaan yang mereka alami. Beberapa perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Heavy Industries dan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., menjadi target penyitaan aset. Keputusan pengadilan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap perjanjian 2015 yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi para korban .

Jepang merespons dengan tindakan diplomatik yang keras, termasuk membatasi ekspor bahan-bahan teknologi tinggi ke Korea Selatan, yang mempengaruhi industri teknologi negara tersebut. Tindakan ini memicu krisis ekonomi dan mengakibatkan kerugian besar bagi sektor teknologi di Korea Selatan. Pembatasan ekspor ini juga memaksa Korea Selatan untuk mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain dan mengurangi ketergantungan pada Jepang . Pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2019 menargetkan bahan-bahan utama yang diperlukan untuk produksi semikonduktor dan elektronik lainnya, industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Korea Selatan. Gangguan ini menyebabkan kekacauan dalam rantai pasokan global dan memaksa perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk beradaptasi dengan cepat, mencari pemasok alternatif, dan mengembangkan teknologi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku dari Jepang. Langkah-langkah ini, meskipun diperlukan, menambah biaya produksi dan mengurangi profitabilitas, memberikan tekanan tambahan pada ekonomi Korea Selatan yang sudah berjuang dengan pertumbuhan yang melambat .

Selain dampak ekonomi langsung, ketegangan diplomatik ini juga mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas ekonomi di Korea Selatan. Ketidakpastian yang meningkat mengenai hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang membuat beberapa investor ragu untuk menanamkan modal di negara tersebut. Penurunan kepercayaan ini dapat mengurangi aliran investasi asing ke Korea Selatan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara tersebut. Ketegangan yang meningkat juga mempengaruhi kerjasama

keamanan di kawasan Asia Timur. Korea Selatan dan Jepang, yang seharusnya menjadi sekutu dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan meningkatkan stabilitas regional, justru terlibat dalam perselisihan yang berkepanjangan. Ketidakmampuan kedua negara untuk bekerja sama secara efektif mengurangi efektivitas aliansi mereka dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman bersama. Situasi ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak seperti China dan Korea Utara, yang dapat memanfaatkan ketegangan ini untuk memperkuat posisi mereka di kawasan dan mengurangi tekanan dari aliansi AS-Korea Selatan-Jepang .

Dialog terbuka antara pemerintah, para korban, dan kelompok aktivis menjadi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang lebih memadai. Kerjasama multilateral dengan melibatkan negara-negara lain dan organisasi internasional juga dapat membantu dalam mediasi dan memberikan tekanan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan. Edukasi publik mengenai isu Jugun Ianfu dan pentingnya mengakui sejarah kelam ini juga menjadi langkah penting dalam proses rekonsiliasi. Pada akhirnya, penyelesaian isu Jugun Ianfu memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan menghormati hak-hak para korban. Pengakuan penuh dan permintaan maaf tanpa syarat dari pemerintah Jepang sangat penting untuk memulihkan kehormatan dan martabat para korban. Selain itu, kompensasi yang adil dan berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan yang layak .

Kesimpulannya, dampak berakhirnya perjanjian tentang isu Comfort Women (Jugun Ianfu) terhadap hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2019 sangat signifikan. Ketegangan diplomatik yang meningkat, dampak ekonomi yang merugikan, dan gangguan dalam kerjasama keamanan regional menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dan pentingnya penyelesaian yang adil dan inklusif. Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki hubungan dan mencari solusi yang lebih baik, jalan menuju rekonsiliasi yang sesungguhnya masih panjang dan memerlukan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Hanya dengan pengakuan penuh, permintaan maaf, dan kompensasi yang adil, luka sejarah ini dapat

benar-benar sembuh, dan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dapat berkembang ke arah yang lebih positif dan stabil

Daftar Pustaka

Hadiwinata, Bob Sugeng. Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Tanaka, Y. (2003). Japan's Comfort Women: Sexual slavery and prostitution during World War II and the US occupation. In Japan's Comfort Women: Sexual slavery and prostitution during World War II and the US Occupation. <https://doi.org/10.4324/9780203302750>

Hindra, Eka, and Kimura Koichi. "Momoye: Mereka Memanggilku [they called me Momoye]." (2007).

Chun, J. (2021). Who Decides Foreign Policy? The Role Of National Trauma In Shaping The Influence Of Public Opinion in South Korea. Policy Studies. Vol. 15. No. 1

Dyansa, C. S. (2018). Kebijakan Jepang dalam Menyelesaikan Isu Comfort Women dengan Korea Selatan pada Tahun 2015.

Ariani, M. D. (2021). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KOREA SELATAN DALAM KASUS. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 196.

Prashernanda, H. (2019). Dinamika Isu Comfort Women Hingga Munculnya Pergerakan Redress Movement for Comfort Women.

The Tokyo War Crimes Tribunal: The History and Legacy of the War Crimes Trials against Japan after World War II (di bagian Introduction)

JUGUN IANFU : DERITA PEREMPUAN DALAM PUSARAN PERANG
Titiek Suliyati Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Lee, Sue R. "Comforting the comfort women: Who can make Japan pay." U. Pa. J. Int'l Econ. L. 24 (2003): 509.

Le, T. P. (2019). Negotiating in Good Faith: Overcoming Legitimacy Problems in Japan - South Korea Reconciliation Process. The Journal of Asian Studies. Vol. 78 No. 3

Kumagai, N. (2016). The Background to the Japan - Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue. *Asia-Pacific Review*. Vol. 23 No. 1.